



DPKPP
Membangun Bogor

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021

**Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan**



dpkppbogorkab



@dpkpp_BogorKab



<https://dpkpp.bogorkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021.

Laporan menggambarkan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Serta gambaran wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2021 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR**

AJAT ROCHMAT JATNIKA, ST, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197109071999011001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Pengukuran Kinerja.....	9
B. Analisis Kinerja.....	10
C. Realisasi Anggaran	17
D. Analisis Efisiensi.....	18
E. Realisasi Program.....	19
F. Realisasi Kegiatan.....	21
BAB IV PENUTUP.....	87
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2020, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, diantaranya :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sekretariat;
2. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring evaluasi dan pelaporan Dinas;
3. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
4. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
5. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
6. Pengelolaan keuangan Dinas;
7. Pengelolaan situs web Dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan

dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2021.

Secara keseluruhan capaian kinerja kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2021 dinyatakan “berhasil”, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sudah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja utama sebesar 108.03%.

Pencapaian kinerja dari indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2021, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

Posisi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan public sekaligus yang lebih responsive, professional, efektif dan efisien, sederhana, transparan, responsive dan adaptif sekaligus dapat membangun kualitas manusia, meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depan Kabupaten Bogor secara menyeluruh.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor secara optimal berupaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada Tahun Anggaran 2021. Hal ini tidak saja karena telah dapat memanfaatkan sarana/prasarana kerja dan anggaran, namun juga didukung oleh semangat dan etos kerja melalui pemahaman tugas pokok dan fungsi.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah

untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dinas lebih prima dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

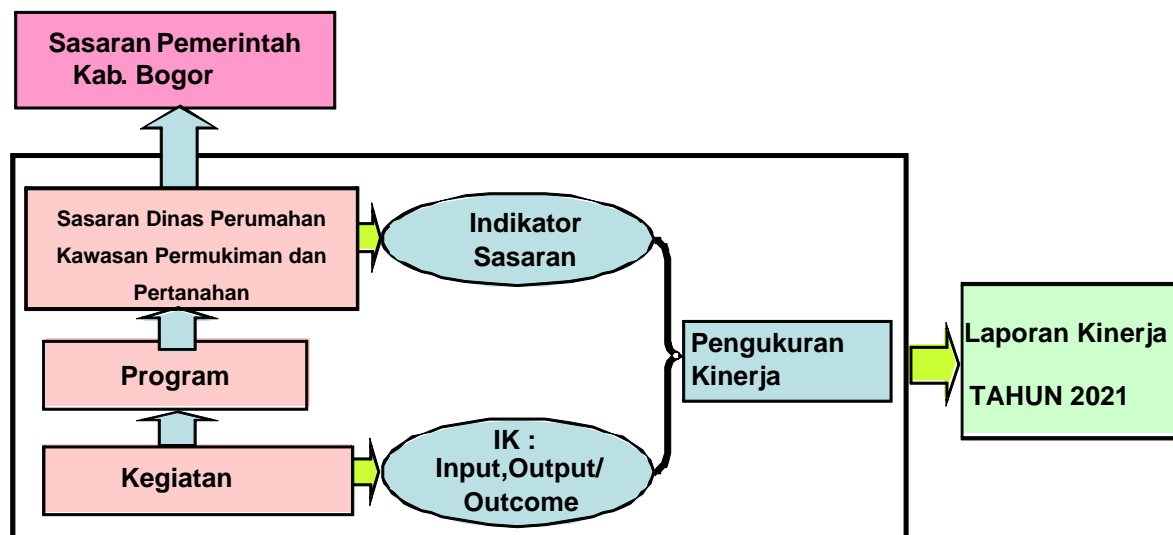
A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; ntah tahun 2021. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021, disajikan dalam **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran kinerja

Metode penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2021 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor selama tahun 2021 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada perubahan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2021. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Uraian ini tercantum dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi;

5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

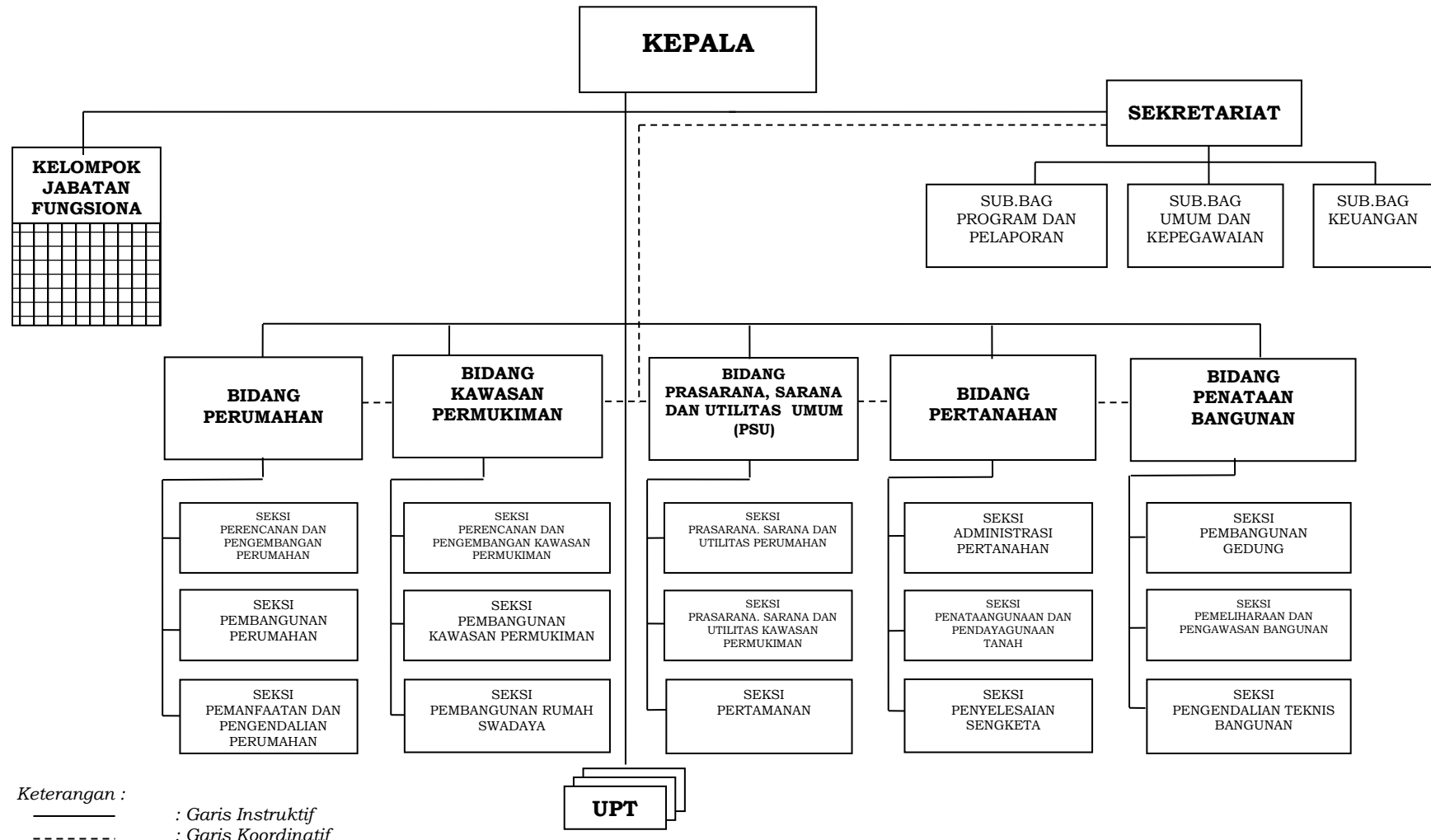
D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
 - b. Seksi Pembangunan Perumahan; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Pembangunan Rumah Swadaya.
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahkan :
 - a. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
 - b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Pertamanan.
6. Bidang Penataan Bangunan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan Gedung;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Teknis Bangunan.

7. Bidang Pertanahan, membawahkan :
 - a. Seksi Administrasi Pertanahan;
 - b. Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa.
8. UPT
 - a. UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong;
 - b. UPT Pengawas Bangunan II Wilayah Ciawi;
 - c. UPT Pengawas Bangunan III Wilayah Leuwiliang; dan
 - d. UPT Rumah Susun Umum Sewa Kelas A.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2021 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2019–2023. Berikut Sasaran, indikator dan target Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Berdasarkan Perubahan Renstra tahun 2019-2023, yaitu :

Tabel 2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Tahun 2019-2020						
Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni	Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh	13.45%	28.15%	-	-	-
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	94.15%	94.79%	-	-	-
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0.067%	0.055%	-	-	-
Meningkatnya jumlah bidang lahan yang bersertifikat	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	60%	65%	-	-	-
	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/ lahan bersertifikat	75%	78%	-	-	-
Tahun 2021-2023						
	Persentase permukiman layak	-	-	99.72%	99.86%	100%
Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni	-	-	18.42%	27.09%	35.84 %
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas permukiman kumuh	-	-	0.13%	0.07%	0
Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	-	-	100%	100%	100%
Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	Tingkat pelayanan unsur pertanahan	-	-	54.02%	77.01%	100

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja.

Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021, yaitu :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni	18.42%
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas permukiman kumuh	0.13%
Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	100%
Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	Tingkat pelayanan unsur pertanahan	54.02%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2021, diukur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni	18.42%	18.74%	101.74%
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas permukiman kumuh	0.13%	0.15%	85.34%
Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	100%	100%	100%
Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	Tingkat pelayanan unsur pertanahan	54.02%	68.45%	126.71%

B. Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor 2019-2023 melalui 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2021.

Didalam perubahan Renstra 2021 terdapat perubahan Sasaran Strategis sehingga terdapat perbedaan antara sasaran strategis tahun 2020 dengan tahun 2021, sehingga hal ini juga berpengaruh pada perubahan indikator kinerja.

Adapun analisis tingkat pencapaian kinerja dari 4 (Empat) sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan;
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman;
3. Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya;
4. Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan.

Sasaran strategis tersebut merupakan upaya mencapai tujuan :

1. Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
2. Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, dapat dijabarkan pada tabel dan uraian setiap sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang pertama ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni

Indikator	2021			Capaian 2021 thdp 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penyediaan rumah layak huni	18.42%	18.74%	101.74%	52.29%

Berdasarkan target indikator kinerja pada perubahan Renstra tahun 2021 sebesar 18.42%, persentase penyediaan rumah layak huni, sesuai realisasi di tahun 2021 adalah sebesar 18.74%,. pencapaian kinerja adalah 101.74% (Sangat Tinggi). Kontribusi pencapaian kinerja ini melalui Program Pengembangan Perumahan kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana yang dialokasikan oleh APBD sebanyak 17 Unit, dan yang dibangun oleh Kementerian PUPR sebanyak 563 unit sehingga total Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana berjumlah 580 unit dan Program Kawasan Permukiman Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, dengan jumlah 1.996 Unit, dan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar 1.648 unit dari dana Provinsi dengan jumlah 1100 unit rumah, sehingga total penanganan Rumah Tidak Layak huni di tahun 2021 berjumlah 4.744 unit.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pengaplikasian petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerjasama Perbaikan RTLH, BSPS dan Banprov;

2. Koordinasi intensif yang dilakukan dengan stakeholder mempermudah pelaksanaan;
3. Kesigapan dinas dalam menangani berbagai bentuk permasalahan yang terjadi di lapangan;

Keberhasilan pencapaian kinerja ini pun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi terutama :

1. Belum optimalnya dukungan stakeholder untuk pemenuhan pelayanan dasar urusan perumahan rakyat
2. Belum tercapainya kesepakatan tentang kompensasi pelepasan aset tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII kebun Cikasungka untuk pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) bagi korban bencana alam di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga landclearing (pembukaan lahan) dan pembangunan Huntap belum dapat dilaksanakan sampai akhir tahun 2021.
3. Sulitnya ketersediaan lahan untuk lahan pembangunan hunian tetap, salah satunya terkendala belum tercapainya kesepakatan tentang kompensasi pelepasan aset tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII kebun Cikasungka untuk pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) bagi korban bencana alam di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga landclearing (pembukaan lahan) dan pembangunan Huntap belum dapat dilaksanakan sampai akhir tahun 2021.
4. Masyarakat mengusulkan dobel bantuan RTLH yaitu ke provinsi dan APBD sehingga setelah dilakukan verifikasi terdapat 4 nama penerima yang tidak diserap di APBD dikarenakan sudah mendapat bantuan dari provinsi.

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan dalam antara lain :

1. Melakukan koordinasi tingkat internal dan eksternal dalam pencapaian kesepakatan terkait kompensasi pelepasan aset tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII kebun Cikasungka, untuk lahan pembangunan hunian tetap (Huntap).
2. Melakukan koordinasi tingkat internal dan eksternal dalam pencapaian kesepakatan terkait kompensasi pelepasan aset tanah

Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII kebun Cikasungka, untuk lahan pembangunan hunian tetap (Huntap).

3. Berkoordinasi dengan instansi lain untuk kesanggupan dan kesiapan dalam pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap).
4. Melakukan verifikasi data eksisting penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
5. Menyusun data calon penerima calon lokasi (CPCL) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan hasil verifikasi.
6. Melakukan koordinasi serta monitoring secara intensif mengenai perkembangan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilapangan dengan Tim Koordinasi, Tim Fasilitator Lapangan, Mitra Kecamatan dan Desa.

2. Meningkatnya kualitas permukiman

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang kedua ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Persentase Luas Permukiman Kumuh

Indikator	2021			Capaian 2021 thdp 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase luas permukiman kumuh	0.13%	0.15%	85.34%	0,15%

Berdasarkan target tahun 2021 sebesar 0.13%, berkurangnya kawasan kumuh sesuai realisasi di tahun 2021 adalah sebesar 0.18% Realisasi pencapaian kinerja adalah 138.46% (Sangat Tinggi). Kontribusi Pencapaian kinerja ini melalui Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang dialokasikan oleh APBD Kabupaten Bogor dan bantuan dari APBN berupa program Kota Tanpa kumuh (Kotaku).

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Ada dokumen perencanaan yang jelas dalam penanganan kumuh sehingga kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran;
2. Target capaian penanganan kumuh tercapai dengan baik karena setiap tahun dilakukan evaluasi dengan menghitung pengurangan kumuh dan dampaknya;
3. Adanya partisipasi masyarakat dengan membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman.

Namun dalam pelaksanaan sasaran berkurangnya luas permukiman kumuh ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Perlu dukungan terkait anggaran yang sesuai dengan target penuntasan kumuh.
2. Belum tersosialisasinya penginputan usulan kegiatan kedalam SIPD oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara menyeluruh.
3. Kurangnya dukungan stakeholder lain dalam penuntasan kawasan kumuh.
4. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga butuh upaya dalam melakukan penyadaran perilaku hidup sehat;
5. Kondisi geografis dan budaya di wilayah permukiman yang berbeda dapat mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi kumuh;
6. Masih kurang dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak semua masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan;

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan dalam pencapaian saran berkurangnya luas permukiman kumuh adalah :

1. Koordinasi terkait penambahan anggaran guna percepatan penuntasan kumuh sesuai dengan target Bupati.
2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dalam memfasilitasi penerima bantuan dalam hal ini BKM untuk kelancaran mengakses SIPD yang sesuai dengan kamus hibah.

3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait agar rencana kegiatan yang dilakukan sejalan dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh, guna tercapainya penuntasan kumuh.
4. Akan dibentuk SK Tim Koordinasi Penanganan Kumuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi stakeholder dalam penanganan kumuh.

3. Tertatanya Bangunan Gedung Dan Lingkungan

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang ketiga ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Indikator	2021			Capaian 2021 thdp 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan target tahun 2021 sebesar 100%, persentase penyelenggaraan penataan bangunan realisasi di tahun 2021 adalah sebesar 100% Realisasi pencapaian kinerja adalah 100% (Sangat Tinggi). Kontribusi Pencapaian kinerja ini oleh Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Didaerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan yang jelas dalam pembangunan gedung sehingga kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran;
2. Koordinasi yang terjalin baik dengan stakeholder yang terkait kegiatannya .

Namun dalam pelaksanaan sasaran terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung tersebut ada penambahan waktu kerja yang diakibatkan manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik dari pelaksana jasa konstruksi;

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
2. Berkoordinasi dengan konsultan pengawas agar pihak pelaksana jasa konstruksi untuk segera menyelesaikan pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

4. Meningkatnya Tertib Tata Kelola Pertanahan

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang keempat ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Unsur Pertanahan

Indikator	2021			Capaian 2021 thdp 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
Tingkat pelayanan unsur pertanahan	54.02%	68.45%	126.71%	68.45%

Berdasarkan target tahun 2021 sebesar 100%, tingkat pelayanan unsur pertanahan realisasi di tahun 2021 adalah sebesar 100% Realisasi pencapaian kinerja adalah 126.71% (Sangat Tinggi). Kontribusi Pencapaian

kinerja ini oleh Program Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Penyelesaian Sengketa tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Bogor Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam satu (satu) daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Koordinasi yang baik diinternal dan stakeholder lain dalam fasilitasi penyelesaian sengketa.
2. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam rangka pensertipikatan aset pemda

Namun dalam pelaksanaan sasaran terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Masih banyak aset tanah Pemerintahan yang belum memiliki dokumen kepemilikan tanah;
2. Dalam penerbitan sertifikat kewenangan ada pada kantor BPN.
3. Masih banyaknya tanah Pemerintah Daerah yang belum teridentifikasi.

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Menanggapi dengan cepat pengaduan sengketa pertanahan.
2. Terus dilakukan identifikasi dan pengukuran tanah yang menjadi aset pemda.
3. Koordinasi dan membuat komitmen dengan BPN agar bidang tanah/lahan milik pemerintah yang didaftarkan untuk disegerakan proses pensertifikatannya.
4. Memanfaatkan aplikasi Sistem Aplikasi Pertanahan.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 dari program utama dan program pendukung adalah sebesar Rp. 183.638.771.164.- atau 96.27 % dari pagu sebesar

Rp. 190.757.576.996.-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran meningkatnya kualitas kasawan permukiman yaitu sebesar 98.78%. sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan yaitu 58.10%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran DPKPP di Tahun 2021

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	101.74%	7.168.098.754	4.164.365.178	58.10
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	85,34%	109.552.959.144	108.219.306.208	98.78
Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya	100%	38.928.210.050	38.034.246.244	97.70
Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	126.71%	3.545.829.948	3.307.849.425	93.29

D. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi yang dilakukan pada 4 (empat) Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 adalah Sasaran pertama yaitu Meningkatkan pelayanan penyediaan perumahan Target 18.42 % , Realisasi 18.74% dengan nilai Capaian Kinerja 101.74%, Sasaran yang Kedua Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dengan target 0.13%, realisasi 0.18% dengan nilai Capaian Kinerja 138.46% sasaran ketiga Tertatanya bangunan gedung dan lingkungan dengan target 100%, realisasi 100 % dengan nilai Capaian Kinerja 100%. Dan sasaran keempat

Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan target 54.02%, realisasi 68.45% dengan nilai capaian 126.71 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran di Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
1.	Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	101.74%	4.164.365.178
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	85.34%	108.219.306.208
3.	Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya	100%	38.034.246.244
4.	Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	126.71%	3.307.849.425

E. Realisasi Program

Pencapaian Indikator Kinerja Utama di atas merupakan hasil kontribusi dari Pelaksanaan 10 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan 5 Bidang, keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh Rata-rata Tingkat Capaian Program (Outcome) sebesar 93.43% dengan predikat kerja Sangat Tinggi. Capaian Program DPKPP dijabarkan secara rinci dalam lampiran I laporan ini, sedangkan untuk penjelasan keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri dari 1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Penataan Bangunan pada Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan dan UPT Penataan Bangunan (I, II dan III) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 96.84%.
2. Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 kegiatan, 1 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Penataan Bangunan pada Seksi Pembangunan Gedung, dengan tingkat

capaian kinerja sebesar 100 % dan tingkat capaian anggaran sebesar 97.77 %.

3. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 5 kegiatan 9 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Seksi Pembangunan Perumahan, dan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 54.56.% dan tingkat capaian anggaran sebesar 58.10%.
4. Program Pengembangan Permukiman terdiri dari 1 kegiatan 2 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Seksi PSU Permukiman dan Seksi Pertamanan, tingkat capaian kinerja sebesar 94.44% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98.45%.
5. Program Kawasan Permukiman terdiri dari 3 kegiatan 6 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Kawasan Permukiman pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman, Seksi Rumah Swadaya, dan UPT Penataan Bangunan (I,II,dan III) dengan tingkat capaian kinerja sebesar sebesar 87.05% dan tingkat capaian anggaran sebesar 99.53%.
6. Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdiri dari 1 kegiatan 3 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Seksi PSU Perumahan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98.22 % dengan tingkat capaian anggaran sebesar 96.19 %.
7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Pemanfaatan Tanah terdiri dari 1 kegiatan 1 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan pada Seksi Penyelesaian Sengketa, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98.44%.

8. Program Pengelolaan Tanah Kosong terdiri dari 1 kegiatan 1 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan pada Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 96.60%.
9. Program Penatagunaan Tanah terdiri dari 1 kegiatan 3 Sub Kegiatan, program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan pada Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah dan Seksi Administrasi Pertanahan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 88.52%.
10. Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah terdiri dari 8 kegiatan 33 Sub Kegiatan. Program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat sebagai penunjang kegiatan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 94.77%.

F. Realisasi Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 95.71%, termasuk dalam kategori predikat “Sangat Tinggi, adapun Realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 183.638.771.164.-, dengan Tingkat Capaian sebesar 96.27 %, dari total rencana anggaran sebesar Rp 190.757.576.996.- termasuk dalam kategori predikat “Sangat Tinggi”. Capaian Kegiatan DPKPP dijabarkan secara rinci dalam lampiran I laporan ini.

Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, terdiri dari 1 kegiatan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.610.323.403,- terealisasi sebesar Rp. 2.527.733.270,- atau 96.84 %, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah

bangunan dan lingkungannya yang tertata sebanyak 100 %, terealisasi sebanyak 100 % atau 100 %; dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1.1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.610.323.403,- terealisasi sebesar Rp. 2.527.733.270,- atau 96.84 %, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah dokumen laporan Pendataan objek media luar dan dalam ruang reklame di Kabupaten Bogor sebanyak 40 dokumen, Jumlah dokumen laporan pengawasan dan pengendalian objek media luar dan dalam ruang sebanyak 40 dokumen, Jumlah Panggung Reklame Pemerintah yang terpelihara 5 unit, Jumlah Papan Pengumuman yang tersedia sebanyak 33 unit, Jumlah Terbangunnya Lettersign sebanyak 1 unit, Jumlah tertatanya reklame di jalur strategis sebanyak 3 dokumen, terealisasi jumlah 40 dokumen, 40 dokumen, 5 unit, 33 unit, dan 1 unit atau 100 %.

2. Program Penataan Bangunan Gedung, terdiri dari 1 kegiatan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

2.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dari rencana anggaran sebesar Rp. 36.317.886.647,- terealisasi sebesar Rp. 35.506.512.974,- atau 97.77 %, dengan output dari rencana Jumlah bangunan gedung yang dibangun sebanyak 3 gedung terealisasi sebanyak 3 gedung, Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun sebanyak 8 dokumen, Jumlah dokumen pengawasan kegiatan konstruksi bangunan gedung sebanyak 3 dokumen , Jumlah Pagar yang terbangun sebanyak 1 unit dan Jumlah Gedung yang direhabilitasi sebanyak 1 unit, terealisasi

- sebanyak 8 dokumen perencanaan teknis, 3 dokumen pengawasan, 1 unit pagar, 1 unit rehabilitasi gedung atau 100 %;
3. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 5 kegiatan 9 Sub Kegiatan rencana anggaran sebesar Rp. 7.168.098.754.- terealisasi sebesar Rp. 4.164.365.178.- atau 58.10 %, dengan output dari rencana persentase penyediaan rumah layak huni di lokasi bencana 37.19 % realisasi 20.29 % dengan perincian sebagai berikut :
- 3.1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 401.949.920.- terealisasi sebesar Rp. 377.641.650.- atau 93.95 %, dengan output dari rencana Dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 3 dokumen terealisasi 3 dokumen atau 100 %, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 3.1.1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 195.650.020,- terealisasi sebesar Rp. 179.745.400,- atau 91.87 %, dengan output dari rencana Jumlah bangunan rumah tinggal dilokasi rawan bencana sebanyak 4 kecamatan, terealisasi 4 kecamatan atau 100%.
- 3.1.2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 189.395.300,- terealisasi sebesar Rp. 183.041.650,- atau 96.65 %, dengan output dari rencana Pembuatan sistem database potensial lahan calon relokasi bencana sebanyak 1 paket terealisasi sebanyak 1 paket data base atau 100 %.
- 3.1.3 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dari rencana anggaran sebesar Rp. 16.904.600,- terealisasi sebesar Rp. 14.854.600,- atau 87.87 %, dengan output dari rencana Jumlah data kondisi rumah

tinggal masyarakat yang terdampak bencana sebanyak 12 dokumen terealisasi sampai 10 dokumen atau 83.33%.

3.2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah dari rencana anggaran sebesar Rp. 46.059.650.- terealisasi sebesar Rp. 43.522.000.- atau 94.49 %, dengan output dari rencana Jumlah Kepala Keluarga calon penghuni Huntap sebanyak 563 Kepala Keluarga, persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di 2 kecamatan, terealisasi 563 Kepala Keluarga yang mendapatkan sosialisasi terkait Huntap, di 2 kecamatan atau 100 %.

3.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.958.455.395.- terealisasi sebesar Rp. 3.016.228.034.- atau 50.62 %, dengan output dari rencana Jumlah hunian tetap yang terbangun bagi korban bencana (pemasangan Listrik) sebanyak 563 unit, Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) sebanyak 2 dokumen, Jumlah Dokumen UPL/UKL sebanyak 1 dokumen, Jumlah Lokasi Landclearing Huntap Cigudeg dan Leuwisadeng sebanyak 2 lokasi, Jumlah Penyusunan Sistem Informasi Perumahan sebanyak 1 sistem, Jumlah Rumah dan PSU Huntap Leuwisadeng sebanyak 17 unit, dan Jumlah Sewa Lahan Huntara sebanyak 1 lokasi, terealisasi 205 unit pemasangan listrik di Huntap, 2 Dokumen DED, 1 dokumen UKL/UPL, 1 Lokasi Landclearing di Kecamatan Leuwisadeng, 1 Sistem Aplikasi si Huntap, 17 Unit Pembangunan Huntap beserta PSU dan 1 lokasi sewa lahan huntara atau 100 %.

3.4 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dari rencana anggaran sebesar Rp. 402.523.184.-

teralisasi sebesar Rp. 379.097.800.- atau 94.18 %, dengan output dari rencana jumlah rusunawa yang tertib pengelolaannya sebanyak 1 lokasi terealisasi 1 lokasi atau 100 %, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

3.4.1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dari rencana anggaran sebesar Rp. 129.793.300.- terealisasi sebesar Rp. 123.310.100.- atau 95.00 %, dengan output dari rencana Jumlah Rumah Susun Yang Ditata sebanyak 2 Dokumen terealisasi 2 Dokumen atau 100 %.

3.4.2 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun dari rencana anggaran sebesar Rp. 272.729.884.- terealisasi sebesar Rp. 255.787.700.- atau 93.79 %, dengan output dari rencana Jumlah penghuni rusunawa yang dilayani administrasinya sebanyak 196 unit terealisasi 196 unit atau 100 %.

3.5 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 359.110.606,- terealisasi sebesar Rp. 347.875.694,- atau 96.87 %, dengan output dari rencana Jumlah dokumen Surat Pertimbangan Teknis yang dikaji rencana teknisnya sebanyak 1000 dokumen terealisasi 1032 dokumen atau 103.20 %, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

3.5.1 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 209.232.755,- terealisasi Rp. 208.877.294,- atau 99.83 % dengan output dari rencana Jumlah dokumen PDRT (Surat Pertimbangan Teknis) yang dikaji rencana teknisnya sebanyak 750 dokumen, Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam kawasan perumahan sebanyak 3 dokumen, terealisasi sebanyak 1032 dokumen atau 137.60 % dan 3 dokumen atau 100 % dengan tingkat capaian 118.80 %

3.5.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 149.877.850,- terealisasi Rp. 138.998.400,- atau 92.74 % dengan output dari rencana Jumlah dokumen peta sebaran perumahan sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %.

4. Program Pengembangan Permukiman terdiri dari 1 kegiatan 2 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

4.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 73.978.396.824,- terealisasi sebesar Rp. 72.828.987.576,-.atau 98,45%, dengan output dari rencana Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara sebanyak 97 lokasi terealisasi sebanyak 85 lokasi atau 87.63 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

4.1.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 35.253.231.581,- terealisasi sebesar Rp. 34.915.500.083,- atau 99.04 %, dengan output dari rencana Jumlah jembatan Rawayan yang dibangun sebanyak 33 unit, Jumlah TPU yang dibangun fasilitasnya sebanyak 5 TPU dan Jumlah TPU yang terpelihara sebanyak 22 TPU terealisasi sebanyak 33 jembatan rawayan, 4 TPU yang tertata dan 12 TPU yang terpelihara perumahan atau 78.18 %.

4.1.2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 38.725.165.243,- terealisasi sebesar Rp. 37.913.487.493,- atau 97.90 %, dengan output dari rencana Jumlah Jumlah taman kota dan taman jalur jalan

yang terbangun dan/atau tertata sebanyak 8 lokasi, Jumlah taman yang terjaga dan terpelihara sebanyak 28 lokasi terealisasi sebanyak 8 lokasi taman yang tertata/terbangun, dan 28 lokasi taman yang terjaga/terpelihara atau 100 %.

5. Program Kawasan Permukiman terdiri dari 3 kegiatan 6 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

5.1 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman kumuh, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.061.767.097,- terealisasi sebesar Rp. 2.032.386.422,- .atau 96.57 %, dengan output dari rencana Jumlah Surat Pertimbangan Teknis non perumahan yang dikaji sebanyak 1.730 dokumen terealisasi sebanyak 1.730 dokumen atau 100 %, dengan rincian 2 sub kegiatan sebagai berikut :

5.1.1 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik dari rencana anggaran sebesar Rp. 786.694.918,- terealisasi sebesar Rp. 786.626.468,-.atau 99.99 %, dengan output dari rencana Jumlah Surat Pertimbangan Teknis non perumahan yang dikaji sebanyak 375 dokumen dan Jumlah RKB/SLF yang dikeluarkan sebanyak sebanyak 100 dokumen, terealisasi sebanyak 701 dokumen Surat pertimbangan teknis non perumahan dan 154 dokumen RKB/SLF atau 170.47 %.

5.1.2 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT I) dari rencana anggaran sebesar Rp. 156.210.258,- terealisasi sebesar Rp. 148.414.628,-.atau 95.01 %, dengan output dari rencana Jumlah gambar situasi Wilayah UPT I yang dikeluarkan sebanyak 400 berkas dan Jumlah Surat

Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m² diwilayah UPT I yang dikaji 18 berkas, terealisasi sebanyak 669 dokumen gambar situasi dan 18 berkas surat pertimbangan teknis atau 133.63 %.

- 5.1.3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT II) dari rencana anggaran sebesar Rp. 138.044.418,- terealisasi sebesar Rp. 131.673.567,- atau 95.38 %, dengan output dari rencana Jumlah gambar situasi Wilayah UPT II yang dikeluarkan sebanyak 300 dokumen dan Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m² diwilayah UPT II yang dikaji 14 berkas, terealisasi sebanyak 225 dokumen gambar situasi dan 13 berkas pertimbangan teknis atau 88.93 %.
- 5.1.4 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT III) dari rencana anggaran sebesar Rp. 192.028.468,- terealisasi sebesar Rp. 181.955.112,- atau 94.75 %, dengan output dari rencana Jumlah gambar situasi Wilayah UPT III yang dikeluarkan sebanyak 260 dokumen dan Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m² diwilayah UPT III yang dikaji 6 berkas, terealisasi sebanyak 365 dokumen gambar situasi dan 6 berkas pertimbangan teknis atau 120.19 %.
- 5.1.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh, dari rencana anggaran sebesar Rp. 310.707.900,- terealisasi sebesar Rp. 308.441.750,- atau 99.27 %, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah

Dokumen Monitoring dan Wasdal Bangunan Non Perumahan sebanyak 250 bangunan, terealisasi sebanyak 257 bangunan atau 102.80 %.

5.1.6 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT I) , dari rencana anggaran sebesar Rp. 153.165.169,- terealisasi sebesar Rp. 148.292.823,- atau 96.82%, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah dokumen pengadaan dan pengendalian bangunan di wilayah UPT I sebanyak 12 dokumen, terealisasi sebanyak 12 dokumen atau 100%.

5.1.7 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT II) , dari rencana anggaran sebesar Rp. 131.176.500,- terealisasi sebesar Rp. 129.641.600,- atau 98.83 %, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian di wilayah UPT II sebanyak 12 dokumen terealisasi sebanyak 12 dokumen atau 100%.

5.1.8 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT III) , dari rencana anggaran sebesar Rp. 193.739.439,- terealisasi sebesar Rp. 191.741.874,- atau 98.97 %, dengan output kegiatan dari rencana Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Bangunan Di Wilayah UPT III sebanyak 12 dokumen, terealisasi sebanyak 12 dokumen atau 100%.

5.2 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.344.968.854,- terealisasi sebesar Rp. 2.338.676.622,-.atau 99.73 %, dengan output dari rencana Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang

Tertangani sebanyak 87.84 % terealisasi sebanyak 93.16 % atau 106.06 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

5.2.1 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dari rencana anggaran sebesar Rp. 433.678.354,- dengan output dari Jumlah dokumen rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh sebanyak 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100 %.

5.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.911.290.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.910.850.500,- atau 99.98 %, dengan output dari Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani sebanyak 38.6 Ha, Jumlah desa tertinggal yang tertangani sebanyak 3 lokasi, Jumlah desa P2WKSS sebanyak 1 lokasi terealisasi sebanyak 23.52 Ha atau 60.93%, sebanyak 3 lokasi atau 100 %, sebanyak 1 lokasi atau 100 % dengan tingkat capaian 86.98 %.

5.3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha perumahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.673.746.619,- terealisasi sebesar Rp. 30.543.989.738,- atau 99.58 %, dengan output dari rencana Jumlah rumah tidak layak huni yang telah direhabilitasi sebanyak 2000 unit terealisasi sebanyak 1996 unit atau 99.80 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

5.3.1 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.540.168.269,- terealisasi sebesar Rp. 30.411.058.848,- atau 99.58 %, dengan output dari Jumlah Kecamatan lokasi RTLH yang

dikerjasamakan sebanyak 2000 unit terealisasi sebanyak 1996 unit atau 99.80 %.

5.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dari rencana anggaran sebesar Rp. 133.578.350,- terealisasi sebesar Rp. 132.930.890,- atau 99.52 %, dengan output dari Jumlah Lokasi yang tertangani infrastruktur sosial ekonomi wilayahnya sebanyak 41 lokasi terealisasi sebanyak 41 lokasi atau 100 %.

6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari rencana anggaran sebesar Rp. 494.079.750,- terealisasi sebesar Rp. 475.265.850,- atau 96.19 %, dengan output dari persentase PSU perumahan yang telah menjadi asset pemda sebanyak 74.17 % terealisasi sebanyak 72.85 % atau 98.22 %, terdiri dari 1 kegiatan 3 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

6.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 494.079.750,- terealisasi sebesar Rp. 475.265.850,- atau 96.19 %, dengan output dari rencana Jumlah PSU perumahan yang telah menjadi aset pemda sebanyak 15 perumahan terealisasi sebanyak 15 perumahan atau 100 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

6.1.1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 222.009.500,- terealisasi sebesar Rp. 215.241.500,- atau 96.95 %, dengan output dari rencana Dokumen identifikasi dan verifikasi PSU Perumahan sebanyak 5 Perumahan, terealisasi sebanyak 5 Perumahan atau 100 %.

6.1.2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dari rencana

anggaran sebesar Rp. 195.051.200,- terealisasi sebesar Rp. 186.251.200,- atau 95.49 %, dengan output dari rencana Jumlah pemulihan aset PSU yang terlantar sebanyak 35 Perumahan, terealisasi sebanyak 35 Perumahan atau 100 %.

6.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari rencana anggaran sebesar Rp. 77.019.050,- terealisasi sebesar Rp. 73.773.150,- atau 95.79 %, dengan output dari rencana Jumlah perumahan yang terpantau proses pembangunan PSU nya sebanyak 55 Perumahan, terealisasi sebanyak 55 Perumahan atau 100 %.

7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Pemanfaatan Tanah terdiri dari 1 kegiatan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

7.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.632.949.290,- terealisasi sebesar Rp. 1.607.396.532,- atau 98,44 %, dengan output dari rencana Jumlah sengketa tanah garapan yang terselesaikan sebanyak 5 sengketa dan , Jumlah bidang tanah aset pemda yang dimohonkan pada permohonan pengukuran sebanyak 500 Bidang terealisasi sebanyak 5 dokumen hasil mediasi sengketa dan 500 bidang peta bidang tanah atau 100 %.

8. Program Pengelolaan Tanah Kosong terdiri dari 1 kegiatan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

8.1 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, dari rencana anggaran sebesar Rp. 88.983.568,- terealisasi sebesar Rp. 85.956.750,- atau 96.60 %, dengan output dari rencana Jumlah

Dokumen Data Inventarisasi Tanah Kosong sebanyak 1 Dokumen, terealisasi sebanyak 1 Dokumen atau 100 %.

9. Program Penatagunaan Tanah terdiri dari 1 kegiatan 3 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

9.1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.823.897.090,- terealisasi sebesar Rp. 1.614.496.143,-atau 88.52 %, dengan output dari rencana Persentase bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya sebanyak 12.99 % terealisasi sebanyak 12.99 % atau 100 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

9.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dari rencana anggaran sebesar Rp. 187.211.000,- terealisasi sebesar Rp. 185.872.000,-atau 99.28 %, dengan output dari rencana Persentase bidang tanah yang diproses PBT nya melalui PTSL di BPN sebanyak 65.000 Bidang dan Jumlah Target SHAT sebanyak 90.000 Bidang, terealisasi sebanyak 65.000 Bidang PBT melalui PTSL dan 90.000 Bidang SHAT atau 100 %.

9.1.2 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 79.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 77.689.000,- atau 98.03 %, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah sebanyak 1 Dokumen, terealisasi sebanyak 1 Dokumen atau 100 %.

9.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.557.436.090,- terealisasi sebesar Rp. 1.350.935.143,-atau 86.74 %, dengan output dari rencana Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya sebanyak 1000 Bidang, terealisasi sebanyak 1.442 Bidang atau 144 %.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan 33 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

10.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 346.529.400,- terealisasi sebesar Rp. 342.057.075,- atau 98.71 %, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun sebanyak 15 Dokumen terealisasi sebanyak 15 Dokumen atau 100 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

10.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 153.565.500,- terealisasi sebesar Rp. 150.595.475,-.atau 98.07 %, dengan output dari rencana Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sebanyak 5 Dokumen, terealisasi sebanyak 5 Dokumen atau 100 %.

10.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 16.778.850,- terealisasi sebesar Rp. 16.777.750,-.atau 99.99 %, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen RKA sebanyak 1 Dokumen, terealisasi sebanyak 1 Dokumen atau 100 %.

10.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 18.521.850,- terealisasi sebesar Rp. 18.418.000,- atau 99.44 %, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen Perubahan RKA sebanyak 3 Dokumen, terealisasi sebanyak 3 Dokumen atau 100 %.

10.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 17.516.550,- terealisasi sebesar Rp. 17.406.500,-.atau 99.37 %, dengan output dari rencana Jumlah DPA dan Jankin yang tersusun

sebanyak 3 Dokumen, terealisasi sebanyak 3 Dokumen atau 100 %.

10.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 21.073.050,- terealisasi sebesar Rp. 20.245.100,-.atau 96.07 %, dengan output dari rencana Jumlah Perubahan DPA dan Perubahan Jankin yang tersusun sebanyak 7 Dokumen, terealisasi sebanyak 7 Dokumen atau 100 %.

10.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 18.208.250,- terealisasi sebesar Rp. 18.203.550,-.atau 99.97 %, dengan output dari rencana Jumlah dokumen hasil evaluasi program/kegiatan yang tersusun sebanyak 5 Dokumen, terealisasi sebanyak 5 Dokumen atau 100 %.

10.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 100.865.350,- terealisasi sebesar Rp. 100.410.700,-.atau 99.55 %, dengan output dari rencana jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD (dalam dan luar daerah) sebanyak 4 Dokumen, terealisasi sebanyak 4 Dokumen atau 100 %.

10.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 24.113.331.397,- terealisasi sebesar Rp. 23.645.419.158,-.atau 98.06 %, dengan output dari rencana Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Gaji /Tunjangan yang dibayarkan ke ASN sebanyak 7 Dokumen terealisasi sebanyak 7 Dokumen atau 100 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

10.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 23.879.458.843,- terealisasi sebesar Rp. 23,439,463,908,-.atau 98.16 %, dengan output dari rencana Jumlah gaji dan tunjangan PNS

Perangkat Daerah yang terbayarkan sebanyak 12 Bulan, terealisasi sebanyak 12 Bulan atau 100 %.

10.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 181.892.404,- terealisasi sebesar Rp. 160.335.000,- atau 88.15 %, dengan output dari rencana Jumlah dokumen hasil pengujian/verifikasi keuangan sebanyak 1 Laporan, terealisasi sebanyak 1 Laporan atau 100 %.

10.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.684.950,- terealisasi sebesar Rp. 6.332.750,- atau 94.73 %, dengan output dari rencana Laporan akuntansi SKPD sebanyak 1 Laporan, terealisasi sebanyak 1 Laporan atau 100 %.

10.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 10.801.650,- terealisasi sebesar Rp. 10.635.750,- atau 98.46 %, dengan output dari rencana Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 Laporan, terealisasi sebanyak 1 Laporan atau 100 %.

10.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan sebesar Rp. 6.197.050,- terealisasi sebesar Rp. 4.751.500,- atau 76.67 %, dengan output dari rencana Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan sebanyak 1 Laporan, terealisasi sebanyak 1 Laporan atau 100 %.

10.2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar Rp. 18.346.900,- terealisasi sebesar Rp. 16.262.000,- atau 88.64 %, dengan output dari rencana Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran sebanyak 1 Dokumen, terealisasi sebanyak 1 Dokumen atau 100 %.

10.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebesar Rp. 9.949.600,- terealisasi sebesar Rp. 7.638,250,-.atau 76.77 %, dengan output dari rencana Jumlah Laporan analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 Laporan, terealisasi sebanyak 1 Laporan atau 100 %.

10.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 54.188.536,- terealisasi sebesar Rp. 53.443.573,-.atau 98.63 %, dengan output dari rencana Jumlah barang milik daerah yang dikelola sebanyak 4 Dokumen terealisasi sebanyak 4 Dokumen atau 100 %.

10.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 527.742.680,- terealisasi sebesar Rp. 462.052.007,- atau 87.55 %, dengan output dari rencana Jumlah pegawai yang terlayani administrasinya sebanyak 17 Layanan terealisasi sebanyak 17 Layanan atau 100 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

10.4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dari rencana anggaran sebesar Rp. 346.542.680,- terealisasi sebesar Rp. 314.750.207,-.atau 90.83 %, dengan output dari rencana Jumlah dokumen administrasi kepegawaian sebanyak 12 Bulan, terealisasi sebanyak 12 Bulan atau 100 %.

10.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari rencana anggaran sebesar Rp. 106.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 83.500.000,-.atau 78.63 %, dengan output dari rencana Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 13 Orang, terealisasi sebanyak 13 Orang atau 100 %.

10.4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 63.801.800,- atau 85.07 %, dengan output dari rencana Jumlah Pegawai mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 6 orang, terealisasi sebanyak 6 orang atau 100 %.

10.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.660.097.597,- terealisasi sebesar Rp. 1.501.864.210,- atau 90.47 %, dengan output dari rencana Jumlah pelayanan umum perangkat daerah yang terpenuhi sebanyak 17 Layanan terealisasi sebanyak 17 Layanan atau 100 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

10.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.967.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.178.000,- atau 97.45 %, dengan output dari rencana Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia sebanyak 31 Jenis, terealisasi sebanyak 31 Jenis atau 100 %.

10.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 922.059.535,- terealisasi sebesar Rp. 836.231.099,- atau 90.69 %, dengan output dari rencana Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia sebanyak 75 Jenis, terealisasi sebanyak 75 Jenis atau 100 %.

10.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dari rencana anggaran sebesar Rp. 51.823.720,- terealisasi sebesar Rp. 50.652.000,- atau 97.74 %, dengan output dari rencana Jumlah peralatan rumah tangga tersedia sebanyak 22 Jenis, terealisasi sebanyak 22 Jenis atau 100 %.

- 10.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 133.901.788,- terealisasi sebesar Rp. 133.440.000,- atau 99.66 %, dengan output dari rencana Jumlah bahan logistik kantor tersedia sebanyak 31 Jenis, Jumlah Pengisian Tabung Gas yang Tersedia sebanyak 80 Kali, dan Jumlah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran yang Tersedia sebanyak 12 Kali, terealisasi sebanyak 31 Jenis Bahan Logistik kantor, 80 Kali Pengisian Tabung Gas dan 1 Kali Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran atau 69,44 %.
- 10.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 105.505.750,- terealisasi sebesar Rp. 103.640.550,- atau 98.23 %, dengan output dari rencana Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia sebanyak 13 Jenis, terealisasi sebanyak 12 Jenis atau 92.31 %.
- 10.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.305.000,- atau 99.84 %, dengan output dari rencana Jumlah Buku Per-UU, Surat Kabar dan Majalah yang Tersedia sebanyak 2 Orang, terealisasi sebanyak 2 Orang atau 100 %.
- 10.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 299.617.000,- terealisasi sebesar Rp. 257.966.500,- atau 86.10 %, dengan output dari rencana Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi sebanyak 2 Jenis, terealisasi sebanyak 2 Jenis atau 100 %.
- 10.5.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 88.872.804,- terealisasi sebesar Rp. 62.451.061,- atau 70.27 %, dengan output dari rencana Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

Penatausahaan Arsip Dinamis sebanyak 3 Orang, terealisasi sebanyak 3 Orang atau 100 %.

10.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.277.287.500,- terealisasi sebesar Rp. 736.212.000,- atau 57.64 %, dengan output dari rencana Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia sebanyak 2 Unit terealisasi sebanyak 1 Unit atau 50 %.

10.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.743.309.740,- terealisasi sebesar Rp. 2.425.287.936,- atau 88.41 %, dengan output dari rencana Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 17 Layanan terealisasi sebanyak 17 Layanan atau 100 %, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

10.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.200.000,- atau 100 %, dengan output dari rencana Jumlah materai yang tersedia sebanyak 12 Bulan 550 Pcs, terealisasi sebanyak 12 Bulan 550 Pcs atau 100 %.

10.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari rencana anggaran sebesar Rp. 773.319.000,- terealisasi sebesar Rp. 621.712.691,- atau 80.40 %, dengan output dari rencana Jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jumlah Rekening Listrik yang dibayarkan, Jumlah Rekening Telepon yang dibayarkan, Jumlah Tagihan Internet yang dibayarkan sebanyak 12 Bulan, terealisasi sebanyak 12 Bulan atau 100 %.

10.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.962.790.740,- terealisasi sebesar Rp. 1.796.375.245,- atau 91.52 %, dengan

output dari rencana Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Umum Kantor sebanyak 12 Bulan, Jumlah Petugas Keamanan yang Dibiayai sebanyak 30 Orang, Jumlah Petugas Kebersihan yang Dibiayai sebanyak 12 Bulan 27 Orang dan Upah Kerja Pegawai Honorer sebanyak 14 Orang, terealisasi sebanyak 12 Bulan 30 Orang Petugas Keamanan, 27 Orang Petugas Kebersihan dan 14 Orang Pegawai Honorer atau 100 %.

10.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 839.992.250,- terealisasi sebesar Rp. 746.668.150,- atau 88.89 %, dengan output dari rencana Jumlah Layanan Administrasi sebanyak 17 Layanan terealisasi sebanyak 17 Layanan atau 100 %, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

10.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 442.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 392.102.150,- atau 88.65 %, dengan output dari rencana Biaya Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Kendaraan Roda 2, Roda 4, Roda 6 sebanyak 95 Unit, terealisasi sebanyak 95 Unit atau 100 %.

10.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp. 91.220.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.781.500,- atau 94.04 %, dengan output dari rencana Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara sebanyak 3 Jenis, terealisasi sebanyak 3 Jenis atau 100 %.

10.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 306.472.250 terealisasi sebesar

Rp. 266.784.500,- atau 87.70 %, dengan output dari rencana Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terpelihara sebanyak 3 Jenis, terealisasi sebanyak 3 Jenis atau 100 %.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Dinas Perumahan, Kawjasan Permukiman dan Pertanian Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
	Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman													
		Pelaksanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	%	30,19	2.610.323.403	30,19	2.527.733.270	100,00	96,84			
								-						
		Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	%	100	2.610.323.403	100,00	2.527.733.270	100,00	96,84			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan yang tersusun	Dokumen	2	2.610.323.403	2	2.527.733.270	100,00	96,84	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah jalur yang tertata	Dokumen	3		3						
				Jumlah bangunan yang non perumahan yang diawasi dan dikendalikan	Bangunan	0		0						
				Jumlah Tugu Batas yang Terbangun		0		0						
				Jumlah dokumen laporan Pendataan objek media luar dan dalam ruang reklame di Kabupaten Bogor	Dokumen	40		40						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
				Jumlah dokumen laporan pengawasan dan pengendalian objek media luar dan dalam ruang reklame di Kabupaten Bogor	Dokumen	40		40						
				Jumlah Panggung Reklame Pemerintah yang terpelihara	Unit	5		5						
				Jumlah Papan Pengumuman yang tersedia	Unit	33		33						
				Jumlah Terbangunnya Lettersign	Unit	1		1						
				Jumlah tertatanya reklame di jalur strategis	Jalur	3		3						
				Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian bangunan di wilayah UPT I	Dokumen	0		0						
				Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian bangunan di wilayah UPT II	Dokumen	0		0						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
				Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian bangunan diwilayah UPT III	Dokumen	0		0						
		Pelaksanaan penyelenggara aan bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang tertata	%	100	36.317.886.647	100	35.506.512.974	100	97,77			
		Rehabilitasi dan pembangunan bangunan gedung negara	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	Gedung	3	36.317.886.647	3	35.506.512.974	100,00	97,77			
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	Gedung	3	36.317.886.647	3	35.506.512.974	100	97, 77	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
				Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun	Dokumen	8		8						
				Jumlah dokumen pengawasan kegiatan konstruksi bangunan gedung	Dokumen	3		3						
				Jumlah Pagar yang terbangun	Unit	1		1						
				Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Gedung	1		1						
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana	%	37,19	7.168.098.754	20,29	4.164.365.178	54,56	58,10	Landclearing Cigudeg tidak terserap tidak dikarnakan belum ada keepakatan antara pemerintah daerah dengan PTPN VIII	Mengkoordina sikan kembali dengan pihak terkait di tahun 2022	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
		Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Dokumen	3	401.949.920	3	377.641.650	100	93,95			
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sebaran perumahan di lokasi rawan bencana	Dokumen	3	195.650.020	3	179.745.400	100,00	91,87	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah bangunan rumah tinggal dilokasi rawan bencana	Kecamatan	4		4						
			Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Data lahan potensial calon relokasi bencana	Paket	1	189.395.300	1	183.041.650	100,00	96,65	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Data tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	12	16.904.600	10	14.854.600	83,33	87,87	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
		Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga calon penghuni Huntap	KK	563	46.059.650	563	43.522.000	100,00	94,49			
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarela wan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat yang terdampak bencana	KK	563	46.059.650	563	43.522.000	100,00	94,49	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				terrealisasinya persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Kecamatan	2		2						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
		Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	%	37,19	5.958.455.395	20,29	3.016.228.034	54,56	50,62			
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah hunian tetap yang terbangun bagi korban bencana	Unit	17	5.958.455.395	17	3.016.228.034	100,00	50,62	Landclearing Cigudeg tidak terserap dikarnakan belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan PTPN VIII	Mengkoordinas ikan kembali dengan pihak terkait di tahun 2022	AGAR PEMBANGUN AN HUNTAP DI SUKAJAYA DAN CIGUDEG SELESAI TAHUN 2022
				Jumlah Dokumen Perencanaan (DED)	Dokumen	2		2						
				Jumlah Dokumen UPL/UKL	Dokumen	1		1						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
				Jumlah laporan Pendampingan P3BK	Dokumen			0						
				Jumlah Lokasi Landclearing Huntap Cigudeg dan Leuwisadeng	Lokasi	2		1						
				Jumlah Penyusunan Sistem Informasi Perumahan	Sistem	1		1						
				Jumlah Rumah Huntap Leuwisadeng yang teraliri listrik	Unit	563		205						
				Jumlah Sewa Lahan Huntara	Lokasi	1		1						
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah korban bencana yang direhabilitasi										
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah hunian tetap yang terbangun bagi korban bencana										
		Penyelenggara an penyediaan hunian vertikal												

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
		Menyelenggarakan tata usaha rumah susun Menyelenggarakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	jumlah rusunawa yang tertib pengelolaannya	Lokasi	1	402.523.184	1	379.097.800	100,00	94,18			
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah unit rusunawa yang dikelola	Unit	196	272.729.884	196	255.787.700	100,00	93,79	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Yang Ditata	Dokumen	2	129.793.300	2	123.310.100	100,00	95,00	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
		Penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman												
		Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen Surat Pertimbangan Teknis yang dikaji rencana teknisnya	Dokumen	1.000	359.110.605	1.032	347.875.694	103,20	96,87			
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Surat Pertimbangan Teknis yang dikaji rencana teknisnya	Dokumen	750	209.232.755	1.032	208.877.294	118,80	99,83	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam kawasan perumahan	Dokumen	3		3						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen data identifikasi perumahan	Dokumen	1	149.877.850	1	138.998.400	100,00	92,74	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
		Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	jumlah surat keterangan pemanfaatan bangunan gedung	Dokumen	613	-	-	-	-	-			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	jumlah surat keterangan pemanfaatan bangunan gedung	Dokumen	613	-	-	-	-	-		TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
				terlaksananya kepastian hukum kepada penerima manfaat rumah dilokasi rawan bencana/terkena relokasi dan bangunan dan bangun bangunan yang didirikan di atas lahan milik pemerintah	Kecamatan	9							TIDAK ADA	TIDAK ADA
		Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	%	22,50	73.978.396.824	21	72.828.987.576	94,44	98,45			
		Menyediakan dan mengembang kan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	Lokasi	97	73.978.396.824	85	72.828.987.576	87,63	98,45			

No	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jembatan Rawayan yang dibangun	Unit	33	35.253.231.581	33	34.915.500.083	78,18	99,04	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah TPU yang dibangun fasilitasnya	TPU	5		4						
				Jumlah TPU yang terpelihara	TPU	22		12						
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah taman kota dan taman jalur jalan yang terbangun dan/atau tertata	Lokasi	8	38.725.165.243	8	37.913.487.493	100,00	97,90	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah taman yang terjaga dan terpelihara	Lokasi	28		28						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
		Penataan dan pengembang an kualitas lingkungan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi	%	17,82	35.080.482.570	17,82	34.915.052.782	87,05	99,53			AGAR MENINGKATK AN ALOKASI ANGGARAN UNTUK PROGRAM PENATAAN PEMUKIMAN KUMUH
				Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	56,89		42,15						
		Penerbitan izin pembangunan dan pengembang an perumahan dan kawasan permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman kumuh	Jumlah Surat Pertimbangan Teknis non perumahan yang dikaji	Dokumen	1.730	2.061.767.097	1.730	2.032.386.422	100,00	98,57			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah bangunan non perumahan yang diawasi dan dikendalikan	Bangunan	250	310.707.900	257	308.441.750	102,80	99,27		TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT I)	Jumlah dokumen pengadaan dan pengendalian bangunan di wilayah UPT I	Dokumen	12	153.165.169	12	148.292.823	100,00	96,82			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT II)	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian di wilayah UPT II	Dokumen	12	131.176.500	12	129.641.600	100,00	98,83			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT III)	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Bangunan Di Wilayah UPT III	Dokumen	12	193.739.439	12	191.741.874	100,00	98,97			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Pertimbangan Teknis non perumahan yang dikaji	Dokumen	375	786.694.918	701	786.626.468	170,47	99,99	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah RKB/SLF yang dikeluarkan	Dokumen	100		154						
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT I)	Jumlah gambar situasi Wilayah UPT I yang dikeluarkan	Berkas	400	156.210.285	669	148.414.628	133,63	95,01	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luas sampai dengan 300 m2 diwilayah UPT I yang dikaji	Berkas	18		18						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT II)	Jumlah gambar situasi Wilayah UPT II yang dikeluarkan	Berkas	300	138.044.418	255	131.673.567	88,93	95,38	untuk gambar situasi terkait target tidak tercapai karena adanya perubahan aturan PP16 tertang PBG, jadi banyak KKPR yg menjadi syarat untuk pembuatan Gambar situasi banyak yang tidak keluar. untuk PDRT di karenakan di bulan Februari PP16 tersebut di berlakukan maka untuk PDRT tidak berlaku lagi di UPT	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2 diwilayah UPT II yang dikaji	Berkas	14		13						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT III)	Jumlah gambar situasi Wilayah UPT III yang dikeluarkan	Berkas	260	192.028.468	365	187.553.712	120,19	97,67	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2 diwilayah UPT III yang dikaji	Berkas	6		6						
		Memfasilitasi penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	87,84	2.344.968.854	78,08	2.338.676.622	88,89	99,73			
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Dokumen	3	433.678.354	3	427.826.122	100	98,65	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	38,6	1.911.290.500	23,52	1.910.850.500	86,98	99,98	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah desa tertinggal yang tertangani	Lokasi	3		3						
				Jumlah desa P2WKSS	Lokasi	1		1						
		Merencanakan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuhMembrikan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni yang telah direhabilitasi	Unit	2000	30.673.746.619	1. 996	30.543.989.738	99,80	99,58			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Kecamatan lokasi RTLH yang dikerjasamakan	Unit	2000	30.540.168.269	1.996	30.411.058.848	99,80	99,58	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	ADANYA ALOKASI DANA TANGGAP DARURAT BUAT KEGIATAN RUTILLAHU UNTUK RUMAH- RUMAH YANG BELUM MASUK DAFTAR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Lokasi yang tertangani infrastruktur sosial ekonomi wilayahnya	Lokasi	41	133.578.350	41	132.930.890	100	99,52	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
		Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemda	%	74,17	494.079.750	72,85	475.265.850	98,22	96,19			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
		Memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan komersil	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang telah menjadi aset pemda	Perumahan	15	494.079.750	15	475.265.850	100,00	96,19			
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen identifikasi dan verifikasi PSU Perumahan	Perumahan	5	22.009.500	5	215.241.500	100	96,95	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah pemulihan aset PSU yang terlantar	Perumahan	35	195.051.200	35	186.251.200	100	95,49	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah perumahan yang terpantau proses pembangunan PSU nya	Perumahan	55	77.019.050	55	73.773.150	100	95,79	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
	Bidang Urusan Pertanahan													
		Penyelesaian sengketa pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Pemanfaatan Tanah	persentase bidang tanah sengketa yang terfasilitasi	%	20,00	1.632.949.290	20	1.607.396.532	100	98,44			
		Menyelesaikan sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang terfasilitasi	Sengketa	5	1.632.949.290	5	1.607.396.532	100	98,44			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data hasil mediasi Sengketa Tanah	Sengketa	5	1.632.949.290	5	1.607.396.532	100	98,44	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah bidang tanah aset pemda yang dimohonkan pada pemohonan pengukuran	Bidang	500		500	-					
		Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase lahan kosong yang akan diredistribusi	%	20	-	-	-	-				

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
		Memproses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi subjek dan objek redistribusi tanah yang telah diinventarisasi	%	20	-	-	-	-	-			
			Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Persentase lahan kosong yang akan diredistribusi	%	20	-	-	-	-	-	Tidak ada Permasalahan		TIDAK ADA
		Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang teridentifikasi	%	33,33	88.983.568	33,33	85.956.750	100,00	96,60			
		Memproses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang telah teridentifikasi	Bidang	5	88.983.568	5	85.956.750	100	96,60			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tanah Kosong	Dokumen	1	88.983.568	1	85.956.750	100	96,60	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
		Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	12,99	1.823.897.090	12,99	1.614.496.143	100	88,52			
		Memproses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya	%	12,99	1.823.897.090	12,99	1.614.496.143	100	88,52			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah bidang tanah yang diproses PBT nya melalui PTSL di BPN	Bidang	65.000	187.211.000	65.000	185.872.000	100	99,28	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah Target SHAT	Bidang	90.000		90.000						
			Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah	Dokumen	1	79.250.000	1	77.689.000	100	98,03	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya	Bidang	1000	1.557.436.090	1.442	1.350.935.143	144	86,74	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
				Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang telah diproses PBT nya										
			PROGRAM PENUNJANG											
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100	31.562.479.100	100	29.913.004.109	100	94,77			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Daerah yang ter susun	Dokumen	15	346.529.400	15	342.057.075	100	98,71			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	153.565.500	5	150.595.475	100,00	98,07	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1	16.778.850	1	16.777.750	100,00	99,99	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	3	18.521.850	3	18.418.000	100,00	99,44	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA dan Perjanjian Kinerja yang tersusun	Dokumen	3	17.516.550	3	17.406.500	100,00	99,37	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA dan Perubahan Jankin yang tersusun	Dokumen	7	21.073.050	7	20.245.100	100,00	96,07	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja	Dokumen	5	18.208.250	5	18.203.550	100,00	99,97	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	100.865.350	4	100.410.700	100,00	99,55	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	7	24.113.331.397	7	23.645.419.158	100,00	98,06			
					Orang	177		177						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS Perangkat Daerah yang terbayarkan	Bulan	12	23.879.458.843	12	23.439.463.908	100,00	98,16	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
					Orang	177		177						
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen hasil pengujian/verifikasi keuangan	Laporan	1	181.892.404	1	160.335.000	100,00	88,15	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan akuntansi SKPD	Laporan	1	6.684.950	1	6.332.750	100,00	94,73	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	10.801.650	1	10.635.750	100,00	98,46	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	1	6.197.050	1	4.751.500	100,00	76,67	Efesiensi dari pengadaan ATK dan tidak terlaksananya kegiatan makan minum pada kegiatan Penyiapan bahan tanggapan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/sem esteran	Dokumen	1	18.346.900	1	16.262.000	100,00	88,64	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Laporan	1	9.949.600	1	7.638.250	100,00	76,77	Efisiensi dari pengadaan ATK dan tidak terlaksananya kegiatan makan minum pada kegiatan penyusunan pelaporan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola	Dokumen	4	54.188.536	4	53.443.573	100,00	98,63			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikelola	Dokumen	4	54.188.536	4	53.443.573	100,00	98,63	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terlayani administrasinya	Layanan	17	527.742.680	17	462.052.007	100,00	87,55			
					Layanan	2		2						
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut				-						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Bulan	12	346.542.680	12	314.750.207	100,00	90,83	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
					Orang	24		24						
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	13	106.200.000	13	83.500.000	100	78,63	Tidak terlaksananya kegiatan Rohaniwan dikarenakan pandemi	TIDAK ADA	TIDAK ADA
					Jenis	2		2						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Orang	6	75.000.000	6	63.801.800	100,00	85,07	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Layanan	17	1.660.097.597	17	1.501.864.210	100,00	90,47			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	Jenis	31	30.967.000	31	30.178.000	100,00	97,45	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jenis	75	922.059.535	75	836.231.099	100,00	90,69	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	Jenis	22	51.823.720	22	50.652.000	100,00	97,74	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia	Jenis	31	133.901.788	31	133.440.000	69,44	99,66	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah Pengisian Tabung Gas yang Tersedia	Kali	80		80						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
				Jumlah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran yang Tersedia	Kali	12		1						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	Jenis	13	105.505.750	12	103.640.550	92,31	98,23	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Buku Per-UU, Surat Kabar dan Majalah yang Tersedia	Orang	2	27.350.000	2	27.305.000	100,00	99,84	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi	Jenis	2	299.617.000	2	257.966.500	100,00	86,10	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah petugas dan dokumen penataan arsip dinamis yang terlaksana	Orang	3	88.872.804	3	62.451.061	100,00	70,27	Tidak terserapnya anggaran BPJS non ASN dikarenakan belum ada keputusan dari pemda untuk pembayaran pads tahun 2021	Berkoordinasi dengan BPKAD terkait pembayaran BPJS NON ASN	TIDAK ADA
					Jenis	7								
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	2	1.277.287.500	1	736.212.000	50,00	57,64			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	1.277.287.500	1	736.212.000	50,00	57,64	dikarenakan pandemi unit nya sudah tidak ada sampai dengan akhir kontrak tidak tersedia	dianggarkan kembali di tahun 2022	TIDAK ADA
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya										
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Layanan	17	2.743.309.740	17	2.425.287.936	100,00	88,41			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Bulan	12	7.200.000	12	7.200.000	100,00	100,00	Tidak Ada Permasalahan,	TIDAK ADA	TIDAK ADA
					Pcs	550		550						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	773.319.000	12	621.712.691	100,00	80,40	Efisiensi dari pelaksanaan kegiatan pembayaran Listrik, Telpon, Air dan Internet	TIDAK ADA	TIDAK ADA
				Jumlah Rekening Listrik yang Dibayarkan	Bulan	12		12						
				Jumlah Rekening Telephon yang Dibayarkan	Bulan	12		12						
				Jumlah Tagihan Internet yang Dibayarkan	Bulan	12		12						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan jasa umum kantor	Bulan	12	1.962.790.740	12	1.796.375.245	100,00	91,52	Tidak terserapnya anggaran BPJS non ASN dikarenakan belum ada keputusan dari pemda untuk pembayaran pads tahun 2021	Berkoordinasi dengan BPKAD terkait pembayaran BPJS NON ASN	TIDAK ADA
				Jumlah Petugas Keamanan yang Dibiayai	Orang	30		30						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
				Jumlah Petugas Kebersihan yang Dibiayai	Orang	27		27						
				Upah Kerja Pegawai Honoror	Orang	14		14						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Administrasi	Layanan	17	839.992.250	17	746.668.150	100,00	88,89			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Kendaraan Roda 2 Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Kendaraan Roda 4 Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Kendaraan Roda 6 Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 6 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	95	442.300.000	95	392.102.150	100,00	88,65	Efesiensi dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan	TIDAK ADA	TIDAK ADA

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Strategi / Arah Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7		8		9=8/7*100		10	11	12
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara	Jenis	3	91.220.000	3	85.781.500	100,00	94,04	Tidak Ada Permasalahan, jika realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan efesiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
			Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terpelihara	Jenis	3	306.472.250	3	268.784.500	100,00	87,70	Efesiensi dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
	10					Pagu Anggaran	190.757.576.996	Realisasi	183.638.771.164					
	23													
	61													
								%	PREDIKAT KERJA					
	REALISASI ANGGARAN							96,27	SANGAT TINGGI					
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR PROGRAM)							93,43	SANGAT TINGGI					
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN)							94,96	SANGAT TINGGI					
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN							93,16	SANGAT TINGGI					

BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor telah dicapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja seluruhnya sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bogor antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bogor. Namun demikian, untuk tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip – prinsip Good Governance dan Clean Governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakan evaluasi berkala untuk mengejar pencapaian indikator kinerja dinas;
2. Diperlukan dukungan sinergi dari seluruh komponen baik dan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia dan masyarakat untuk pencapaian target kinerja dinas; dan
3. Mendayagunakan sumber daya UPT untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Cibinong, 2022

**Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bogor**

AJAT ROCHMAT JATNIKA, S.T, M.Si.
NIP. 197109071999011001